

KEMAMPUAN APARAT TERHADAP PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN PANRENG KECAMATAN BARANTI

¹⁾Andi Rismayanti Sappewali, ²⁾Sahar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

andirismayanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan aparat terhadap pengelolaan manajemen Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan manajemen Program Keluarga Harapan di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti. Populasi penelitian sebanyak 3072 orang/jiwa dan sampel sebanyak 97 orang/jiwa. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, penelitian pustaka (library research), kuesioner atau angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan statistik, dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan aparat 67% baik dan pengelolaan manajemen Program Keluarga Harapan 67% baik. Berdasarkan hasil analisis regresi linier, faktor kesadaran 9%, faktor aturan 5%, faktor kemampuan atau keterampilan 3% memengaruhi pengelolaan manajemen Program Keluarga Harapan. Sedangkan faktor organisasi tidak memengaruhi pengelolaan manajemen Program Keluarga Harapan di Kelurahan Panreng.

Kata Kunci: kemampuan aparat, Program Keluarga Harapan

Abstract

This study aims to determine the ability of the apparatus to manage the management of the Family Hope Program and to determine the factors that influence the management of the Family Hope Program in Panreng Village, Baranti District. The research population was 3072 people/person and the sample was 97 people/person. The sampling technique used is purposive sampling. This type of research is descriptive quantitative. Data collection techniques used are observation, library research, questionnaires and documentation. Data analysis techniques using statistics, and linear regression. The results showed that the ability of the apparatus was 67% good and the management of the Hope Family Program was 67% good. Based on the results of linear regression analysis, the awareness factor is 9%, the rule factor is 5%, the ability or skill factor is 3% affects the management of the Expected Family Program. Meanwhile, organizational factors do not affect the management of the Family Hope Program in Panreng Village.

Keywords : the ability of the apparatus, Family Hope Program

A. PENDAHULUAN

Pengembangan lebih lanjut bantuan pemerintah individu merupakan kebutuhan dalam rencana jangka menengah publik, yang mencakup lima target utama, secara spesifik: mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi ketidakkonsistenan antar daerah, bekerja pada kualitas manusia, bekerja pada sifat iklim, dan mengawasi aset reguler dan mengembangkan yayasan lebih lanjut. Pelaksanaannya, yang menjadi prinsip kebutuhan kemajuan masyarakat diberikan kepada pemeliharaan bantuan pemerintah individu, tindakan kelembagaan dan pelaksanaan kerangka jaminan sosial. (Zainollah dan Farid, 2018:165).

Indonesia adalah negara yang menjadikan bantuan pemerintah dari kerabatnya sebagai tujuan. Rencana bantuan pemerintah tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bantuan pemerintah merupakan sebutan yang tidak lazim dalam Bagian IV yang memuat pasal 33 tentang kerangka moneter dan pasal 34 tentang keresahan negara terhadap kumpul-kumpul yang lemah (pemuda miskin dan terlantar) dan kerangka kerja pembantu pensiun federal. Dalam UUD 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa individu-individu yang maju yang difokuskan pada kemakmuran rakyat, rakyat miskin, dan pemuda-pemuda terlantar dipelihara oleh negara. Tanda tercapainya tujuan ini, menurut Bung Karno dalam buku Pengenalan Pancasila, adalah kekurangan dari kemelaratan. Bagaimanapun juga, sampai saat ini bantuan pemerintah yang ideal belum tercapai masih jauh dari asumsi yang diinginkan oleh individu dan para penggagas negara ini. (Aagung, 2014:22).

Mempercepat penurunan kebutuhan seperti halnya membuat strategi di bidang jaminan sosial, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial kontingen bagi keluarga tidak mampu yang ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH (KPM). Program Keluarga Harapan disebut di berbagai negara sebagai uang kontingen bergerak (CCT) atau uang terbatas bergerak. Program Keluarga Harapan yang selama ini berjalan untuk membantu keluarga yang sangat tidak mampu untuk menjaga daya

belinya ketika otoritas publik mengubah biaya bahan bakar.

Program Keluarga Harapan lebih direncanakan sebagai upaya untuk menyusun kerangka jaminan sosial bagi masyarakat miskin hanya sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi selama ini. Melalui Program Keluarga Harapan, keluarga tidak berdaya ditawarkan masuk dan memanfaatkan administrasi sosial penting dalam kesejahteraan, pelatihan, makanan dan gizi, perawatan, dan bantuan, termasuk masuk ke berbagai program jaminan sosial lainnya. Anggota PKH memiliki komitmen berbeda yang harus dipenuhi, khususnya di bidang kesejahteraan dan pelatihan. Komitmen di bidang kesehatan ditandai dengan pemeriksaan kebidanan untuk ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, gizi dan imunisasi balita. Di bidang pengajaran, komitmen anggota PKH diidentikkan dengan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah dasar dan pilihan (SD ke SLTP/SMP).

Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai amanah pelaksanaan dari UU No.40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat dan Perpres No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. PKH menjadikan sebuah program jaminan sosial yang unik dimana disatu sisi PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam konteks kebutuhan dasar terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, namun disisi lain PKH juga bernuansa pemberdayaan yaitu menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui peningkatan kesehatan dan mendorong anak untuk bersekolah. Sasaran dari PKH adalah keluarga sangat miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa administrasi menggabungkan latihan untuk mencapai suatu tujuan, dan dilakukan oleh orang-orang yang membuat komitmen terbaik melalui kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini menyiratkan bahwa

administrasi mencakup mengetahui apa yang perlu mereka lakukan, mengkarakterisasi dan melihat bagaimana melakukannya, dan memperkirakan kelangsungan hidup bisnis mereka. Para pelaksana memiliki tujuan tertentu dan sulit dipahami, namun hasil dan manfaatnya dapat dirasakan, lebih spesifiknya hasil bantuan yang memadai dan dapat secara tegas dipenuhi, barang dan jasa yang diberikan dapat diterima. Dewan juga dapat diartikan sebagai jalur komunikasi yang unik di antara orang-orang dan bekerja sama, ketergantungan untuk memahami tujuan hierarkis yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, jelas ada tiga alasan mendasar diperlukannya pengurus, khususnya administrasi diharapkan dapat mencapai tujuan otoritatif dan individual, pengurus diharapkan dapat menjaga keselarasan antara tujuan, tujuan dan penyelenggaraan pertemuan yang berbenturan, para eksekutif diharapkan untuk mencapai kecakapan dan kelangsungan pekerjaan asosiasi. Dalam memperkirakan pelaksanaan kerja para eksekutif, diperlukan gagasan tentang kecakapan dan kecukupan. Kecakapan diharapkan dapat mengukur kemampuan para pelaksana untuk melakukan suatu tugas secara akurat, yang ditentukan proporsi antara hasil atau hasil yang dicapai dengan informasi atau informasi yang digunakan oleh alat tersebut, sehingga suatu alat dikatakan mahir, dalam hal terjadi itu menciptakan atau mencapai hasil yang lebih menonjol atau efisiensi kerja terjadi. yang lebih tinggi dari informasi, khususnya sebagai aset yang digunakan pekerjaan, bahan mentah, uang tunai, mesin dan waktu.

Produktivitas menyiratkan perakitan mekanis yang dapat membatasi pengeluaran atau menghemat penggunaan aset untuk mencapai hasil atau tujuan hierarkis yang telah ditentukan sebelumnya, dapat disebut sebagai alat yang efektif. Kecukupan adalah kapasitas untuk memilih tujuan yang tepat atau perangkat keras yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah perakitan mekanik dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau teknik yang sesuai untuk mencapai tujuan. Kecukupan adalah melakukan pekerjaan yang benar, menjadi mahir adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Untuk melakukan kapasitas pemerintah, kemampuan administratif diperlukan untuk otoritas pemerintah kota yang solid dengan tujuan

akhir untuk memberikan pemenuhan kepada daerah setempat

Keterkaitan antara Program Keluarga Harapan dengan pengurus adalah bagaimana kapasitas alat tersebut dapat mengawasi atau mengawasi salah satu program otoritas publik, yaitu PKH tertentu yang akan dilaksanakan dan diakui sebagaimana mestinya. menjadi. Keajaiban ini mendukung anggapan bahwa kapasitas administrasi otoritas pemerintah dalam mengawasi pemerintahan para eksekutif di Kelurahan masih sangat rendah, bahkan latihan dewan tidak diselesaikan oleh otoritas pemerintah.

Efektivitas menyiratkan perakitan mekanis yang dapat membatasi biaya atau menghemat penggunaan aset untuk mencapai hasil atau tujuan resmi yang ditentukan sebelumnya, dapat disebut sebagai alat yang terampil. Viabilitas adalah kapasitas untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perangkat dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Kecukupan adalah melakukan pekerjaan yang benar, menjadi produktif adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Untuk melakukan kapasitas pemerintah, kemampuan administratif diperlukan untuk otoritas pemerintah kota yang solid dengan tujuan akhir untuk memberikan pemenuhan kepada daerah setempat.

Keterkaitan antara Program Keluarga Harapan dengan pihak pelaksana merupakan sarana dimana kapasitas alat tersebut dapat mengawal atau mengawal salah satu program otoritas publik, khususnya PKH untuk dilaksanakan dan diakui sebagaimana mestinya. Keajaiban ini membangun anggapan bahwa kapasitas administrasi otoritas pemerintah dalam mengawasi pemerintahan dewan di Kelurahan masih sangat rendah, bahkan latihan eksekutif tidak diselesaikan oleh otoritas pemerintah. Kualitas. Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjadi pekerja yang berkualitas yang dituntut dalam suatu pekerjaan tertentu.

1. Ketepatan waktu. Setiap pekerja memiliki karakteristik yang berbeda untuk jenis pekerjaan tertentu untuk dapat bekerja tepat waktu.

2. Kehadiran. Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Kemampuan kerja sama. Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. Ada beberapa jenis pekerjaan tertentu yang memungkinkan diselesaikan oleh dua orang atau lebih sehingga membutuhkan kerja sama antar karyawan.

Pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada hasil para eksekutif pada dasarnya adalah pemanfaatan ide dan metode dalam bidang bisnis yang kemudian diterapkan pada penyelenggaraan wilayah publik untuk lebih mengembangkan pemerintahan dan pemenuhan individu yang dilayaninya. Gagasan pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada hasil para eksekutif atau yang saat ini biasa disebut sebagai administrasi terbuka baru atau new open administration (NPM) pertama kali dikemukakan pada masa pemerintahan Margaret Thatcher yang saat itu adalah kepala administrator Inggris. Pada saat itu, gagasan NPM digunakan untuk menjawab analisis yang muncul secara lokal hanya sebagai upaya untuk mengurus masalah pemerintah dalam menjalankan asosiasi yang menyambut kekecewaan terbuka dengan administrasi yang diberikan oleh negara. Demikian pula, New Open Administration juga lahir dari analisis kekurangan administrasi publik yang dikoordinasikan oleh negara (Zaidan, 2015: 50). Beberapa standar administrasi dapat dikemukakan, termasuk yang menyertainya (Azhar, 2018: 22).

1. Pembagian kerja. Bila ada kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, maka kelompok akan lebih berhasil guna dan berdaya guna karena baik cara kerjanya.
2. Disiplin. Ketaatan kepada peraturan yang telah disepakati bersama dan kesadaran anggota yang tinggi tentang tanggung jawab dan tugas-tugasnya amat menentukan keberhasilan manajemen.
3. Kesatuan Perintah. Perlu adanya kesatuan perintah untuk menghindari kesimpangsiuran.
4. Kesatuan arah. Kesepakatan tentang arah tujuan merupakan hal yang mengikat kelompok dan mencegah perselisihan.
5. Kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Kepentingan tiap anggota diperhatikan, tetapi kepentingan bersama diutamakan.

6. Rantai berjenjang dan rentang kendali. Manajemen dilakukan bertingkat-tingkat dan merupakan mata rantai yang berjenjang. Rentang kendali suatu manajemen yang sebaiknya terbatas pada 3 tingkat dibawahnya. Hal ini biasanya menghasilkan efektivitas yang tinggi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis pemeriksaan yang digunakan jelas kuantitatif, khususnya eksplorasi informasi yang dikumpulkan dan dikomunikasikan sebagai angka. Informasi kuantitatif yang diberi nomor, misalnya ada skala estimasi. Jenis skala estimasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah model skala Likert. Jadi penduduk dalam penyelidikan ini adalah kelompok masyarakat Kota Panreng yang terdaftar dalam data penduduk Kantor Insight Focal Insight tahun 2020 sebanyak 3.072 orang. Prosedur pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan purposive, khususnya strategi pengujian berdasarkan pertimbangan tertentu, jumlah tes adalah 97 orang. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah persepsi, studi tulis, survei, dokumentasi. Sedangkan strategi pemeriksaan informasi adalah melalui investigasi terukur yang ekspresif untuk mengungkap reaksi responden terhadap faktor eksplorasi termasuk kapasitas aparat kota untuk mengawal pengurus PKH. Langkah terakhir adalah menggambarkan konsekuensi investigasi informasi sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Informasi yang diperoleh melalui jajak pendapat dipecah menggunakan model skala Likert.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas kerja aparat di Kelurahan Panreng, bahwa dari 97 jumlah responden, 4 orang atau 4% responden menjawab sangat baik, 15 orang atau 15% responden menjawab baik, 59 orang atau 62% responden menjawab kurang baik, 14 orang atau 14% responden menjawab tidak baik dan 5 orang atau 5% responden menjawab sangat tidak baik. Dengan melihat rata-rata persentase kualitas 60% kurang baik. Kualitas kerja aparat dinilai masyarakat dengan melihat bagaimana mereka memperlakukan masyarakat. Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan, aparat dinilai kurang berkualitas karena cara mereka memperlakukan masyarakat yang

menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan yang dianggap masih ada yang belum tepat sasaran. Yang seharusnya sebagai penerima manfaat, akan tetapi tidak menerima.

Ketepatan waktu datang dan pulang kerja aparat di Kelurahan Panreng, bahwa dari 97 jumlah responden, 9 orang atau 9% responden menjawab sangat baik, 47 orang atau 49% responden menjawab baik, 35 orang atau 36% responden menjawab kurang baik, 5 orang atau 5% responden menjawab tidak baik dan 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak baik. Dengan melihat rata-rata persentase ketepatan waktu 72% baik. Sebagian aparat sudah menerapkan ketepatan waktu, datang dan pulang pada jam kantor yang telah ditentukan. Meskipun 2 dari 10 orang yang menerapkan hal tersebut, setidaknya pelayanan sudah dapat diberikan oleh aparat yang sudah hadir ini. Meskipun bukan bidangnya, dan atau pelayanan tidak dapat terlaksana secara cepat. Dan jika sudah ada aparat yang hadir bisa memberikan atau mengabari aparat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya Kepala Lurah belum hadir, dan ada masyarakat yang memerlukan tanda tangannya, aparat yang sudah hadir ini akan menelpon Kepala Lurah dan memberikan informasi bahwa ada masyarakat yang memerlukan tanda tangannya, kemudian melalui telepon, Kepala Lurah dapat memberi tahu apakah ia dapat hadir dan menanda tangani ataukah solusi lain yang diberikan oleh Pak Lurah.

kehadiran kerja aparat di Kelurahan Panreng, bahwa dari 97 jumlah responden, 3 orang atau 3% responden menjawab sangat baik, 17 orang atau 18% responden menjawab baik, 57 orang atau 59% responden menjawab kurang baik, 15 orang atau 15% responden menjawab tidak baik dan 5 orang atau 5% responden menjawab sangat tidak baik. Dengan melihat rata-rata persentase kehadiran 60% kurang baik. Kehadiran yang dimaksud dalam hal ini yaitu jujur saat bekerja artinya tidak melakukan korupsi waktu. Korupsi waktu yang seperti tidak meninggalkan pekerjaan saat jam kerja. Tidak sedikit aparat yang meninggalkan kantor ketika jam kerja masih berlangsung atau bisa jadi meninggalkan kantor saat jam istirahat namun, belum kembali ketika sudah memasuki waktu istirahat selesai. Hal ini sering terjadi ketika pukul 11.00 siang atau

antara pukul 13.30 bahkan ada yang kembali ketika tiba waktu absen pulang. Tidak jujur, secara absensi kehadiran yaitu hadir, tepat waktu hadir dan tepat waktu pulang, namun ada waktu kerja yang dikosongkan.

Kemampuan kerja sama aparat di Kelurahan Panreng, bahwa dari 97 jumlah responden, 15 orang atau 15% responden menjawab sangat baik, 60 orang atau 62% responden menjawab baik, 19 orang atau 20% responden menjawab kurang baik, 2 orang atau 2% responden menjawab tidak baik dan 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak baik. Dengan melihat rata-rata persentase kemampuan kerja sama 78% baik. Kemampuan kerja sama aparat di Kelurahan Panreng baik. Bekerja sama dalam pembagian kerja karena tanpa kerja sama, pekerjaan tidak akan dapat terselesaikan secara cepat, tanpa kerja sama tujuan yang ingin dicapai akan terhambat. Selain bekerja sama dalam hal positif, juga bekerja sama dalam hal menyimpang seperti memotong waktu kerja dan hal-hal menyimpang lainnya.

Aparat di Kelurahan Panreng memiliki bagian kerja yang jelas, bahwa dari 97 jumlah responden, 7 orang atau 7% responden menjawab sangat baik, 17 orang atau 18% responden menjawab baik, 57 orang atau 59% responden menjawab kurang baik, 12 orang atau 12% responden menjawab tidak baik dan 4 orang atau 4% responden menjawab sangat tidak baik. Dengan melihat rata-rata persentase pembagian kerja 62% baik. Adanya pemisah jenis pekerjaan yang dilakukan individu, maka suatu pekerjaan akan dapat selesai dengan cepat. Untuk mencapai tujuan organisasi, setiap individu wajib memiliki bagian kerja yang jelas. Setiap individu dalam hal ini aparat Kelurahan Panreng telah memiliki bagian pekerjaan yang jelas. Dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan, seksi pelayanan diberikan tanggung jawab menyalurkan program tersebut. Pembagian pekerjaan, akan dapat disesuaikan dengan kemampuan seseorang, sehingga skill atau kemampuan seseorang dapat lebih terlihat dan yang jelas lebih mengurangi tingkat kerumitan, juga dapat terselesaikan dengan cepat. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih ringan dan tidak memberatkan seseorang. Sehingga untuk setiap jenis pekerjaan dibutuhkan tanggung jawab oleh masing-masing orang. Kedepannya diharapkan

pembagian kerja dapat merata dan adil agar supaya bias mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat.

Kebijakan aturan kerja dibidang pemerintahan telah tertuang dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2017, sehingga wajib bagi aparat pemerintahan untuk taat dan mematuhi. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kelurahan Panreng menganggap bahwa aparat pemerintahannya sudah termasuk disiplin, meskipun tidak keseluruhan. Apabila masyarakat ingin melakukan pelayanan terkait penyaluran Program Keluarga Harapan, pada waktu yang tepat sudah ada aparat yang bersedia melayani. Perihal kedisiplinan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat setempat, meskipun hanya satu atau dua pegawai yang sudah hadir, yang jelas pelayanan sudah bisa berlangsung.

Masyarakat Kelurahan Panreng menilai kesatuan perintah masih perlu dibenahi. Kesatuan perintah dalam hal ini melaksanakan bidang pekerjaan masing-masing secara jelas. Ada pembagian kerja yang jelas, disiplin terhadap aturan kerja yang berlaku, akan tetapi jika tidak ada kejelasan pelaksanaan kerja di bidangnya masing-masing, keefisienan dan keefektifan kerja tidak dapat tercapai secara maksimal. Sesuai porsinya masing-masing, setiap pegawai telah mendapatkan perintah dari atasan untuk melaksanakan dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Seksi pemerintahan dan pelayanan publik, maka bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk salah satunya pelayanan penyaluran bantuan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan. Namun karena tidak sepenuhnya pegawai menerapkan sikap disiplin, sehingga terkadang seksi atau bidang lain yang beralih tugas melaksanakan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan.

Tujuan pengelolaan program keluarga harapan secara jelas yang mengikat aparat di Kelurahan Panreng, bahwa dari 97 jumlah responden, 15 orang atau 16% responden menjawab sangat baik, 65 orang atau 67% responden menjawab baik, 14 orang atau 14% responden menjawab kurang baik, 2 orang atau 2% responden menjawab tidak baik dan 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak baik. Dengan melihat

rata-rata persentase kesatuan arah 79% baik. Prinsip kesatuan arah diterapkan dalam organisasi atau institusi terhadap setiap pegawai yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas, dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas, sejalan dengan program dan rencana yang digariskan termasuk salah satunya Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Sehingga penyalurannya diharapkan dapat terlaksana tepat sasaran. Masyarakat Kelurahan Panreng menilai, aparat belum sepenuhnya memegang teguh prinsip kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena keluhan masyarakat bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan masih belum tepat sasaran. Penyaluran bantuan masih bersifat kekeluargaan dengan aparat pelaksana.

Faktor kesadaran berpengaruh terhadap kemampuan aparat dalam pengelolaan manajemen program, bahwa dari 97 jumlah responden, 8 orang atau 8% responden menjawab sangat berpengaruh, 6 orang atau 6% responden menjawab berpengaruh, 63 orang atau 65% responden menjawab kurang berpengaruh, 19 orang atau 20% responden menjawab tidak berpengaruh dan 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak berpengaruh. Dengan melihat rata-rata persentase faktor kesadaran 60% kurang berpengaruh.

Faktor aturan berpengaruh terhadap kemampuan aparat dalam pengelolaan manajemen program keluarga harapan, bahwa dari 97 jumlah responden, 2 orang atau 2% responden menjawab sangat berpengaruh, 15 orang atau 16% responden menjawab berpengaruh, 69 orang atau 71% responden menjawab kurang berpengaruh, 11 orang atau 11% responden menjawab tidak berpengaruh dan tidak ada responden menjawab sangat tidak berpengaruh. Dengan melihat rata-rata persentase faktor aturan 62% berpengaruh.

Faktor organisasi berpengaruh terhadap kemampuan aparat dalam pengelolaan manajemen program keluarga harapan, bahwa dari 97 jumlah responden, 10 orang atau 10% responden menjawab sangat berpengaruh, 26 orang atau 27% responden menjawab berpengaruh, 50 orang atau 52% responden menjawab kurang berpengaruh, 10 orang atau 10% responden

menjawab tidak berpengaruh dan 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak berpengaruh. Dengan melihat rata-rata persentase faktor organisasi 67% berpengaruh.

Faktor kemampuan atau keterampilan berpengaruh terhadap kemampuan aparat dalam pengelolaan manajemen program keluarga harapan, bahwa dari 97 jumlah responden, 44 orang atau 46% responden menjawab sangat berpengaruh, 39 orang atau 40% responden menjawab berpengaruh, 14 orang atau 14% responden menjawab kurang berpengaruh, tidak ada responden menjawab tidak berpengaruh dan tidak ada responden menjawab sangat tidak berpengaruh. Dengan melihat rata-rata persentase faktor kemampuan atau keterampilan 86% sangat berpengaruh.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kemampuan aparat 67% baik, ditinjau dari kualitas 60% kurang baik, ketepatan waktu 72% baik, kehadiran 60% kurang baik, kemampuan kerja 78% baik. Pengelolaan manajemen Program Keluarga Harapan 67% baik ditinjau dari pembagian kerja 62% baik, disiplin 74% baik, kesatuan perintah 59% kurang baik, kesatuan arah 79% baik dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi 60% kurang baik.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier, faktor kesadaran 9%, faktor aturan 5%, faktor kemampuan atau keterampilan 3% memengaruhi pengelolaan manajemen Program Keluarga Harapan di Kelurahan Panreng. Sedangkan faktor organisasi tidak memengaruhi pengelolaan manajemen Program Keluarga Harapan di Kelurahan Panreng.

E. REFERENSI

- Azhar, A. (2018). *Pokok-pokok Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Dharma, S. S. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djaniatan.
- Handoko, T. H. (2005). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFU UGM.

Jamaluddin, A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Monalisa, I. d. (2020). *Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pasuruan-Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.

Mustafa, H. (n.d.). *Pengantar Manajemen*. STIE Nobel Indonesia.

Pamuji. (2007). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Media Brilian.

Siagian, S. P. (2006.). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo. (2007). *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Zainuddin. (2017). *Teori-teori Mutakhir dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Makassar: Phinatama Media.